

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia telah memberlakukan tata kelola laporan keuangan yang baik bagi sektor publik maupun sektor swasta. Pada akuntansi sektor publik, strategi yang digunakan untuk menunjang terlaksananya tata kelola laporan keuangan yang baik adalah dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan. Tujuan dari adanya reformasi tersebut adalah untuk mewujudkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam rangka melakukan tujuan tersebut, diperlukan adanya sistem dan prosedur yang mampu menunjang pengelolaan laporan keuangan yang baik sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan memiliki arti penting bagi setiap lembaga, baik lembaga yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) maupun lembaga nirlaba (*non profit oriented*).

Fenomena yang terjadi terkait pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan merupakan hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Hal tersebut ditandai dengan adanya komitmen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang mengelola Perguruan Tinggi Negeri untuk selalu berupaya agar laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada setiap tahunnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agar berhasil mendapatkan opini WTP tersebut, Kemenristekdikti terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan yang lebih baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap laporan keuangan Kemenristekdikti, laporan keuangan pada tahun 2016 hingga tahun 2018 berhasil mendapatkan opini WTP dan pada tahun 2019 Perguruan Tinggi berada di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimana laporan keuangan pada tahun 2019 mendapatkan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti dan Kemendikbud

Nama Lembaga	Opini Laporan Keuangan			
	2016	2017	2018	2019
Kemenristekdikti	WTP	WTP	WTP	-
Kemendikbud	-	-	-	WTP

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020

Meski mendapatkan opini WTP, tetapi BPK RI masih saja menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan Kemendikbud, tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tahun 2020 bahwa terdapat permasalahan terkait sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang lemah, seperti (1) entitas yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, (2) sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang kurang memadai, serta (3) sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang belum didukung oleh sumber daya manusia yang layak. Dalam HPS Tahun 2020 tercantum bahwa perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kemendikbud yang belum memiliki grand design pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi, efisien, dan efektif.

Dengan adanya temuan tersebut, tidak memengaruhi Kemendikbud untuk terus berupaya menjaga kualitas laporannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas bila informasi yang dipaparkan dalam laporan keuangan tersebut secara relevan dapat memengaruhi pengambilan keputusan para pengguna atau pembetulan hasil penilaian di masa lalu, bebas dari penguraian yang mengecoh dan kesalahan material, menampilkan setiap bukti secara jujur, dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna dan disesuaikan dengan pemahaman para pengguna informasi keuangan.

Hal pertama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting yang dibutuhkan dalam suatu organisasi karena dapat menjadi penentu dalam mencapai

tujuan organisasi. Menurut Sutrisno (2019), sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mempunyai akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Seluruh potensi SDM tersebut memiliki pengaruh terhadap cara organisasi dalam mencapai tujuan. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, suatu lembaga pasti tidak terlepas dari peran staf bagian keuangan selaku sumber daya manusia yang berperan dalam pengolahan laporan keuangan secara kompeten dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta dapat memahami aturan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain kompetensi sumber daya manusia (SDM), kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi yang berkembang semakin pesat dapat memberikan dampak yang baik jika penggunaan teknologi tersebut didukung oleh SDM yang berkompeten dalam pengelolaan teknologi informasi. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, dapat membantu memudahkan suatu organisasi dalam melakukan proses pencatatan kegiatan transaksi dan pengolahan datanya sehingga dengan demikian akan menciptakan suatu laporan keuangan yang memiliki kualitas baik bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, harus disusun berdasar pada pedoman yang terdapat di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Menurut Mardiasmo (2009), standar akuntansi merupakan acuan atau pedoman yang mengatur mengenai pengolahan akuntansi dalam hal penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan kepada para pengguna laporan

keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk menerapkan standar akuntansi. Laporan keuangan berhasil dikatakan menjadi laporan keuangan yang berkualitas apabila laporan tersebut dapat memberikan informasi kepada pengguna yang memiliki karakteristik kualitatif didalamnya. Hal tersebut sesuai amanah yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas adalah laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Didukung oleh penelitian Rahmawati et al., (2018) yang menjelaskan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi yang terdapat di Jawa Timur khususnya lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi yang merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menggunakan SAP sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. SAP digunakan atas dasar akrual. Dalam standar ini, SAP mengakui pendapatan, pengeluaran, aset, hutang, dan ekuitas dalam laporan keuangan berdasarkan basis akrual, dan mengakuinya saat melaporkan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan, serta dalam hal ini pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berada dalam APBN.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada suatu institusi. Pada penelitian ini mengambil variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Vokasi di Jawa Timur)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur?
- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur?
- c. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan dan menjadi tambahan wawasan pemikiran dalam

pengembangan ilmu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan lembaga pendidikan tinggi negeri vokasi di Jawa Timur.

b. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri Vokasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk membantu instansi dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi maupun pedoman yang berlaku agar bisa jauh lebih baik lagi dan dapat dijadikan contoh bagi instansi-instansi lainnya.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis.